



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURATNO**;
Tempat lahir : Batang Pane III;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/17/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 10 Februari 2024 berlaku dari tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Nomor: SP-Kap/17.a/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 13 Februari 2024 berlaku dari tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa Suratno ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/17/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 16 Februari 2024 berlaku sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Nomor: B-10/L.2.35/Rt.2/Enz.1/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 berlaku sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 124/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-279/ L.2.34/Enz.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 berlaku sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan nomor 167/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 berlaku sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan nomor 167.A/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 27

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor 1325/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 25 Juli 2024, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rafidah, S.H., dan Rekan-rekan Penasihat Hukum, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"**. sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURATNO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar)** subsider **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna kuning dengan nomor Imei 1 : 8654997063631453 Imei 2 : 8654997063631446**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **terdakwa SURATNO** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah WONDO (DPO) yang beralamat di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, ***“Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa SURATNO bersama dengan WONDO (DPO) pergi ke sebuah pondok yang terletak di Desa Batang Pane II untuk menjual shabu milik WONDO (dalam lidik). Kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa SURATNO disuruh oleh WONDO (dalam lidik) untuk mengantarkan shabu ke saksi RIDWAN RIZKI sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu sekitar pukul 23.30 wib terdakwa SURATNO bersama dengan WONDO (dalam lidik) pergi meninggalkan pondok tersebut dan pulang ke rumah WONDO (DPO). Setelah itu terdakwa SURATNO tidur di ruang tamu rumah WONDO (dalam lidik), sedangkan WONDO (dalam lidik) masuk ke dalam kamar tidurnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa dibangunkan oleh anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak yang bernama saksi PASOMAL SIREGAR dan ANDA SAPUTRA SIREGAR dan menanyakan tentang keberadaan WONDO (dalam lidik), akan tetapi pada saat itu WONDO (dalam lidik) sudah tidak ada lagi di rumah. Setelah itu anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa SURATNO, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning, sedangkan terhadap barang bukti shabu ada pada WONDO (dalam lidik);



Bahwa terdakwa SURATNO mengetahui WONDO (dalam lidik) menjual shabu dengan berbagai macam paket, anantara lain ada paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan paket 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa SURATNO ada di perintahkan oleh WONDO (dalam lidik) untuk mengantarkan shabu yang di jualnya kepada saksi RIDWAN RIZKI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa ada menerima keuntungan dari WONDO (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan juga diberikan shabu gratis oleh WONDO (dalam lidik) untuk digunakan;

Bahwa terdakwa SURATNO sudah bekerja dengan WONDO (dalam lidik) untuk menjual shabu sekitar 4 (empat) bulan.

Bahwa terdakwa SURATNO tidak ada memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dari yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang berupa shabu yang ditemukan dari saksi RIDWAN RIZKI adalah shabu yang diserahkan oleh terdakwa SURATNO.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor : R/18/II/RES.4/2024/NARKOBA, tanggal 12 Februari 2024, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidimpuan, Pimpinan Cabang yang bernama KRISTO SITEPU, dan yang menimbang bernama HERU SYAHPUTRA, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga Shabu: a. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan shabu	0,51 gram	0,00 gram	Barang bukti seteah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.



	Yang disita dari tersangka : RIDWAN RIZKI			
--	--	--	--	--

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No.LAB: 1014/NNF/2024, tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **RIDWAN RIZKI** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa **terdakwa RIDWAN RIZKI** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Kantor Kepala Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa SURATNO bersama dengan WONDO (DPO) pergi ke sebuah pondok yang terletak di Desa Batang Pane II untuk menjual shabu milik WONDO (dalam lidik). Kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa SURATNO disuruh oleh WONDO (dalam lidik) untuk mengantarkan shabu ke saksi RIDWAN RIZKI sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu sekitar pukul 23.30 wib terdakwa SURATNO bersama dengan WONDO (dalam lidik) pergi meninggalkan pondok tersebut dan pulang ke rumah WONDO (DPO). Setelah itu terdakwa SURATNO tidur di ruang tamu rumah WONDO (dalam lidik),



sedangkan WONDO (dalam lidik) masuk ke dalam kamar tidurnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa dibangunkan oleh anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak yang bernama saksi PASOMAL SIREGAR dan ANDA SAPUTRA SIREGAR dan menanyakan tentang keberadaan WONDO (dalam lidik), akan tetapi pada saat itu WONDO (dalam lidik) sudah tidak ada lagi di rumah. Setelah itu anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa SURATNO, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning, sedangkan terhadap barang bukti shabu ada pada WONDO (dalam lidik).

Bahwa terdakwa SURATNO mengetahui WONDO (dalam lidik) menjual shabu dengan berbagai macam paket, anantara lain ada paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan paket 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa SURATNO ada di perintahkan oleh WONDO (dalam lidik) untuk mengantarkan shabu yang di jualnya kepada saksi RIDWAN RIZKI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa ada menerima keuntungan dari WONDO (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan juga diberikn shabu gratis oleh WONDO (dalam lidik) untuk digunakan.

Bahwa terdakwa SURATNO sudah bekerja dengan WONDO (dalam lidik) untuk menjual shabu sekitar 4 (empat) bulan.

Bahwa terdakwa SURATNO tidak ada memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dari yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang berupa shabu yang ditemukan dari saksi RIDWAN RIZKI adalah shabu yang diserahkan oleh terdakwa SURATNO.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor : R/18/II/RES.4/2024/NARKOBA, tanggal 12 Februari 2024, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidimpuan, Pimpinan Cabang yang bernama KRISTO SITEPU, dan yang menimbang bernama HERU SYAHPUTRA, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	



1.	Diduga Shabu:			Barang bukti seteah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.
	a. 1 (satu) bungku s plastic klip sedang yang diduga berisik an shabu Yang disita dari tersangka : RIDWAN RIZKI	0,51 gram	0,00 gram	

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No.LAB: 1014/NNF/2024, tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III,
pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik
tersangka **RIDWAN RIZKI** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun
2009 tentang **Narkotika**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Ketiga:

Bahwa **terdakwa RIDWAN RIZKI** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari
2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih
dalam Tahun 2024, bertempat di Kantor Kepala Desa Batang Pane II
Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Padang Sidempuan, "**menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi
diri sendiri**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa SURATNO bersama dengan WONDO (DPO) pergi ke sebuah pondok yang terletak di Desa Batang Pane II untuk mrnjual shabu milik WONDO (dalam lidik). Kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa SURATNO disuruh oleh WONDO (dalam lidik) untuk mengantarkan shabu ke saksi RIDWAN RIZKI sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu sekitar pukul 23.30 wib terdakwa SURATNO bersama dengan WONDO (dalam lidik) pergi meninggalkan pondok tersebut dan pulang ke rumah WONDO (DPO). Setelah itu terdakwa SURATNO tidur di ruang tamu rumah WONDO (dalam lidik), sedangkan WONDO (dalam lidik) masuk ke dalam kamar tidurnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa dibangunkan oleh anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak yang bernama saksi PASOMAL SIREGAR dan ANDA SAPUTRA SIREGAR dan menanyakan tentang keberadaan WONDO (dalam lidik), akan tetapi pada saat itu WONDO (dalam lidik) sudah tidak ada lagi di rumah. Setelah itu anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa SURATNO, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning, sedangkan terhadap barang bukti shabu ada pada WONDO (dalam lidik).

Bahwa awalnya terdakwa SURATNO kenal dengan WONDO (dalam lidik) adalah terdakwa SURATNO membeli shabu dari WONDO (dalam lidik) untuk dipakai oleh terdakwa SURATNO.

Bahwa terdakwa SURATNO mengetahui WONDO (dalam lidik) menjual shabu dengan berbagai macam paket, antara lain ada paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan paket 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa SURATNO ada di perintahkan oleh WONDO (dalam lidik) untuk mengantarkan shabu yang di jualnya kepada saksi RIDWAN RIZKI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa ada menerima keuntungan dari WONDO (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan juga diberikan shabu gratis oleh WONDO (dalam lidik) untuk digunakan sendiri oleh terdakwa SURATNO.

Bahwa terdakwa SURATNO sudah bekerja dengan WONDO (dalam lidik) untuk menjual shabu sekitar 4 (empat) bulan.

Bahwa terdakwa SURATNO tidak ada memiliki ijin dalam hal menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika Golongan I dari yang berwenang.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 035/II/2024, tanggal 11 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Karu.Lab Patologi Klinik RSUD Padangsidempuan yang bernama AHMAD TAUFIK BATUBARA, dengan hasil sebagai berikut :

Ternyata pada urine SURATNO dijumpai narkoba / napza dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan specimen urine.

PEMERIKSAAN NARKOBA	HASIL
Amphetamine (AMP)	(+) Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PASOMAL SIREGAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika golongan I Jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengantar shabu kepada Ridwan Rizki;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) unit handphone Oppo warna kuning dengan nomor Imei 1 : 864997063631453 Imei 2 : 864997063631446. Yang kami temukan disamping kiri posisi Terdakwa tidur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar shabu kepada Ridwan Rizki;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah selama 4 (empat) bulan bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh adalah diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menyerahkan shabu kepada pembeli shabu dan juga diberikan shabu gratis oleh Wondo untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa kalau ada pesanan Terdakwa yang antar;
- Bahwa pemilik shabu adalah Wondo;
- Bahwa 2 (dua) kali Ridwan Rizki memesan shabu;
- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa adalah shabu gratis dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Anda Saputra Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika golongan I Jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengantar shabu kepada Ridwan Rizki;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) unit handphone Oppo warna kuning dengan nomor Imei 1 : 864997063631453 Imei 2 : 864997063631446. Yang kami temukan disamping kiri posisi Terdakwa tidur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar shabu kepada Ridwan Rizki;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah selama 4 (empat) bulan bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh adalah diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menyerahkan shabu kepada pembeli shabu dan juga diberikan shabu gratis oleh Wondo untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa kalau ada pesanan Terdakwa yang antar;
- Bahwa pemilik shabu adalah Wondo;
- Bahwa 2 (dua) kali Ridwan Rizki memesan shabu;
- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa adalah shabu gratis dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah WONDO yang terletak di di Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara. Sedangkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi Polsek Padang Bolak;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bekerja dengan WONDO (dalam lidik/ belum tertangkap), untuk menyerahkan shabu miliknya kepada pembeli shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tidur diruang tamu di rumah WONDO yang terletak di Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara, yang kemudian polisi yang datang kerumah WONDO membangunkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Polisi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja dengan WONDO untuk menyerahkan shabu miliknya kepada pembeli shabu adalah berdasarkan keterangan dari RIDWAN RIZKI yang sebelumnya sudah ditangkap polisi, dan setelah ditanyakan kepada polisi Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RIDWAN RIZKI selama 4 (empat) bulan dan kenal dengan RIDWAN RIZKI karena dirinya biasa membeli shabu dari WONDO;
- Bahwa Terdakwa bekerja menyerahkan shabu milik WONDO kepada pembeli shabu sejak sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap atau sudah selama sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap adalah berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna kuning dengan nomor Imei 1 : 864997063631453 Imei 2 : 864997063631446. Sedangkan handphone milik Terdakwa tersebut ditemukan disamping kiri posisi Terdakwa tidur;
- Bahwa Terdakwa sendiri membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna kuning dengan nomor Imei 1 : 8654997063631453 Imei 2 : 8654997063631446;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor : R/18/II/RES.4/2024/NARKOBA, tanggal 12 Februari 2024, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidempuan, Pimpinan Cabang yang bernama KRISTO SITEPU, dan yang menimbang bernama HERU SYAHPUTRA yang telah disita dari Terdakwa SURATNO berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1014/NNF/2024, tanggal 29 Februari 2024 telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti adalah milik Suratno berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram dengan KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **SURATNO** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah WONDO (dalam lidik/belum tertangkap) yang terletak di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah WONDO (dalam lidik/belum tertangkap) yang terletak di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bekerja dengan WONDO (dalam lidik/ belum tertangkap), untuk menyerahkan shabu miliknya kepada pembeli shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tidur diruang tamu di rumah WONDO yang terletak di Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara, yang kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) yang datang kerumah WONDO untuk membangunkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengetahui bahwa Terdakwa bekerja dengan WONDO untuk menyerahkan shabu miliknya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli shabu adalah berdasarkan keterangan dari RIDWAN RIZKI (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian), dan setelah ditanyakan kepada Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan RIDWAN RIZKI selama 4 (empat) bulan dan kenal dengan RIDWAN RIZKI karena dirinya biasa membeli shabu dari WONDO;
- Bahwa Terdakwa bekerja menyerahkan shabu milik WONDO kepada pembeli shabu sejak sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap atau sudah selama sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada menerima keuntungan dari WONDO (DPO) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan shabu gratis oleh WONDO (dalam lidik) untuk digunakan;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor : R/18/II/RES.4/2024/NARKOBA, tanggal 12 Februari 2024, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidimpuan, Pimpinan Cabang yang bernama KRISTO SITEPU, dan yang menimbang bernama HERU SYAHPUTRA yang telah disita dari Terdakwa SURATNO berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1014/NNF/2024, tanggal 29 Februari 2024 telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti adalah milik Suratno berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram dengan KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **SURATNO** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SURATNO** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah WONDO (dalam lidik/belum tertangkap) yang terletak di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena bekerja dengan WONDO (dalam lidik/ belum tertangkap), untuk menyerahkan shabu miliknya kepada pembeli shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tidur di ruang tamu di rumah WONDO yang terletak di Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara, yang kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) yang datang ke rumah WONDO untuk membangunkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengetahui bahwa Terdakwa bekerja dengan WONDO untuk menyerahkan shabu miliknya kepada pembeli shabu adalah berdasarkan keterangan dari RIDWAN RIZKI (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian), dan setelah ditanyakan kepada Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan RIDWAN RIZKI selama 4 (empat) bulan dan kenal dengan RIDWAN RIZKI karena dirinya biasa membeli shabu dari WONDO;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja menyerahkan shabu milik WONDO kepada pembeli shabu sejak sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap atau sudah selama sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerima keuntungan dari WONDO (DPO) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan shabu gratis oleh WONDO (dalam lidik) untuk digunakan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang serta Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika golongan I, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3 “Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena bekerja dengan WONDO (dalam lidik/ belum tertangkap), untuk menyerahkan shabu miliknya kepada pembeli shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tidur diruang tamu di rumah WONDO yang terletak di Desa Batang Pane III Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara, yang kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) yang datang kerumah WONDO untuk membangunkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengetahui bahwa Terdakwa bekerja dengan WONDO untuk menyerahkan shabu miliknya kepada pembeli shabu adalah berdasarkan keterangan dari RIDWAN RIZKI (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian), dan setelah ditanyakan kepada Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan RIDWAN RIZKI selama 4 (empat) bulan dan kenal dengan RIDWAN RIZKI karena dirinya biasa membeli shabu dari WONDO;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja menyerahkan shabu milik WONDO kepada pembeli shabu sejak sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap atau sudah selama sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerima keuntungan dari WONDO (DPO) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan shabu gratis oleh WONDO (dalam lidik) untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yang berada pada penguasaan Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari tidak bekerja yang mana Terdakwa merupakan seorang Mahasiswa dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa membeli ataupun menjual shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat jelas adanya kerjasama dan pemufakatan jahat antara Terdakwa, Ridwan Rizki (berkas perkara terpisah) dan Wondo (DPO) untuk memperoleh Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimana tujuan Terdakwa dan Ridwan Rizki (berkas perkara terpisah) memperoleh shabu tersebut adalah untuk dijual, hal tersebut diketahui dan dibuktikan dengan adanya peran masing-masing yang diambil antara yang satu dengan yang lainnya untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga hal tersebut sudah patut dijadikan sebagai petunjuk bahwa unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk melakukan kerjasama untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke -3 ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP, setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut dan sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan keterangan, saksi – saksi, bukti surat dimana saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan dari Majelis Hakim, oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna kuning dengan nomor Imei 1 : 8654997063631453 Imei 2 : 8654997063631446 yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan adanya kejadian ini;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna kuning dengan nomor Imei 1 : 8654997063631453 Imei 2 : 8654997063631446;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024**,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **SESY SEPTIANA SEMBIRING, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

SILVIANINGSIH, S.H.M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Panitera,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.